

Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z (Studi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Di Kota Lhokseumawe)

Ratna Farida¹, Ana Zahara¹, Nurmaryahyati¹ dan Eka Chyntia^{2*}

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i1.153>

*Correspondensi: Eka Chyntia

Email: eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

yang dia mbil sebanyak 170 orang.

Informasi yang muncul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi canggih sangat penting dalam mengawasi operasional organisasi dalam administrasi KTP Terkomputerisasi. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Digital di Kota Lhokseumawe, merupakan upaya inovatif untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi dokumen kependudukan. peran kaum milenial juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kaum millennial Gen-Z sangat berpengaruh dalam minat untuk mengadopsi layanan KTP Digital. Persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi digital juga dapat memotivasi penggunaan teknologi digital. Begitu pula pada kepercayaan yang dirasakan, teknologi memiliki peran penting bagi pengguna terhadap pemerintah, sehingga menjadi salah satu faktor generasi millennial dan Gen-Z memutuskan adopsi KTP Digital sebagai alat pengenalan identitas masa depan.

Keywords: Digitalisasi, Kebijakan, Kependudukan,, Milenial, Gen-Z

Abstract: *The innovative drive and part of the Society 5.0 era requires open division organizations to coordinate innovation in the implementation and administration of benefits to make them more efficient, clean, straightforward, responsible and participatory. The concept of E-Government is increasingly known in Indonesia, one of which is the presence of the Advanced KTP approach in early 2023. Millennials and Gen-Z are pioneers of computerized change in Indonesia, this creates a conceptual system related to the application of computerized innovation in civil society organizations. Research I I aims to see the role of millennials and Gen-Z in the implementation of Digital KTPs in Lhokseumawe City. Information was obtained from an overview of the millennial generation and Gen Z through online outreach in January-March 2024 and using questionnaires and interviews. The sample he took was 170 people. The information that appears is analyzed using descriptive analysis. The research results found that the application of advanced technology is very important in monitoring organizational operations in the administration of Computerized KTPs. The implementation of the Digital Population Identity Card in Lhokseumawe City is an innovative effort to*

streamline and modernize the administration of population documents. The role of millennials is also a determining factor in technological development and digitalization. Gen-Z millennials are very influential in the interest in adopting Digital KTP services. Perceived ease of using digital technology can also motivate the use of digital technology. Likewise, regarding perceived trust, technology has an important role for users towards the government, so that it is one of the factors for the millennial generation and Gen-Z to decide to adopt Digital KTPs as a means of identifying identity in the future.

Keywords: *Digitalization, Policy, Population, Millennials, Gen-Z*

Pendahuluan

Transformasi Mekanik 4.0 dan Masyarakat 5.0, khususnya kedekatan IoT, Informasi Besar, AI, dan otonomi Mekanik, telah berperan dalam memahami permasalahan lintas sektor. Pola mekanis saat ini semakin berkembang dalam integrasi dengan berbagai segmen, baik terbuka maupun swasta, yang telah mendorong kemajuan aplikasi dan administrasi modern untuk penyampaian hasil yang efisien kepada mitra, khususnya yang terbuka (Alfarizi, 2023). Ketangkasan administrasi dan kelangsungan otoritatif semakin tercapai hingga saat ini semua organisasi memasuki masa perubahan birokrasi yang maju tanpa kerumitan, khususnya dalam organisasi (Widianis & Sukraaliawan, 2024). Segmen terbuka Indonesia, dalam hal ini pemerintah, sudah semakin terbuka terhadap inovasi yang dibuktikan dengan kemenangan integrasi manfaat dan upaya untuk menaruh perhatian pada transformasi komputerisasi administrasi pemerintahan dalam periode Transformasi Mekanis 4.0 dan Masyarakat. Indonesia terus mempercepat peningkatan kecepatan mekanis dalam bentuk pemerintahan dalam rangka memajukan pelaksanaan dan administrasi manfaat agar lebih efisien, bersih, lugas, bertanggung jawab dan partisipatif serta dapat mengambil kebijakan terbuka dengan lebih cepat (Loris et al., 2024).

Salah satu pendekatan e-Government yaitu perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) menjadi KTP Terkomputerisasi yang dapat dilaksanakan secara bertahap dalam rangka perubahan administrasi organisasi kependudukan. E-KTP adalah kartu kependudukan yang berbasis elektronik, dimana suatu sistem komputer yang sudah dianggap baik dari segi fisik maupun pemakaiannya, yang dalam pelaksanaan pelayanannya bermacam-macam dengan menggunakan system aplikasi atau dengan cara manual seperti masyarakat langsung mendatangi kantor pendaftaran penduduk untuk mengajukan pembuatan KTP Elektronik, dengan menunjukkan KTP dan surat keterangan domisili yang masih berlaku (Astuti & Setiawan, 2024). Selama ini pengurusan E-KTP masih dirasa kurang efektif dan rumit, Pemerintah harus mulai menghapus pelayanan konvensional yang dikenal dengan prinsip antri, lama serta berbelit-belit demi tercapainya efektivitas dalam pelayanan. Terlepas dari itu, hal ini bisa menjadi permasalahan terakhir atas persoalan pencetakan KTP Elektronik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Hal ini yang mendasari pemerintah melakukan perubahan dan inovasi dalam pembuatan E-KTP menjadi KTP Terkomputerisasi yang dianggap mudah dan efisien. Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menyampaikan targetnya adalah 25% dari 275.361.267 masyarakat yang telah menerapkan Karakter Kependudukan Maju (IKD) (Mahmood, 2016). Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota wajib memberdayakan masyarakat untuk beralih ke KTP yang Terkomputerisasi. Peningkatan aplikasi kependudukan yang terkomputerisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan digitalisasi ini, diyakini bahwa akses terhadap informasi kependudukan dapat dikoordinasikan dengan antarmuka berbagai bidang pengajaran, layanan kesejahteraan, pariwisata, transportasi dan koordinasi (Faris et al., 2023). Penanganan digitalisasi informasi kependudukan memerlukan prosedur dan investasi non-finansial yang besar agar dapat berjalan. Para pengambil kebijakan, profesional, dan peneliti menghadapi pertanyaan terkait peran, keterbukaan, dan batasan yang belum terpakai dari inovasi terkomputerisasi dalam bidang tatanan terbuka, khususnya masyarakat. Kemenangan pengurusan KTP yang terkomputerisasi memerlukan keterlibatan mendasar antara pemerintah dan warganya. Mewujudkan pengakuan terhadap inovasi komputer pada administrasi KTP Lanjutan secara terbuka merupakan suatu tantangan. Generasi Millennial dan Gen Z yang dikenal sebagai penggerak utama transformasi digital di masyarakat menjadi target utama dalam perubahan yang terkomputerisasi, khususnya dalam pendekatan Komputerisasi KTP. Milenial dan Gen Z sangat mempercayai pemerintahan yang terbuka, khususnya organisasi kemasyarakatan, yang memiliki birokrasi yang mudah diabaikan dan dapat dengan mudah diakses melalui inovasi komputer, Jadi ini sangat penting.

Metode digitalisasi informasi kependudukan memerlukan prosedur dan usaha non-finansial yang besar agar dapat berjalan. Para pengambil kebijakan, profesional, dan peneliti menghadapi pertanyaan terkait peran, keterbukaan, dan batasan yang belum terpakai dari inovasi terkomputerisasi dalam bidang tatanan terbuka, khususnya masyarakat (Aulya Essy Ritonga, Kariaman Sinaga, 2023). Keberhasilan pendekatan Komputerisasi KTP memerlukan keterlibatan mendasar antara pemerintah dan warganya. Mencapai pengakuan atas teknologi canggih dalam administrasi KTP Digital secara terbuka mungkin merupakan sebuah tantangan. Generasi Milenial dan Gen Z yang dikenal sebagai penggerak utama perubahan maju di masyarakat menjadi sasaran utama dalam perubahan maju, khususnya dalam pendekatan KTP Komputerisasi. Milenial dan Gen Z sangat mempercayai pemerintahan yang terbuka, khususnya organisasi kemasyarakatan, yang memiliki birokrasi yang dapat diabaikan dan dapat diakses secara efektif melalui inovasi yang terkomputerisasi. Jadi sangat penting untuk memperhatikan antarmuka dan kecenderungan era milenial-Gen Z dalam menjalankan organisasi kemasyarakatan. Terlepas dari keterbukaan terhadap inovasi-inovasi canggih yang banyak dibicarakan dalam tulisan terkait, pertanyaan tentang kesimpulan kesadaran pengguna akan keinginan untuk memanfaatkan kemajuan-kemajuan canggih pemerintah masih terbatas. Memahami pengakuan inovasi adalah hal mendasar karena inovasi hanya memiliki sedikit nilai kecuali diakui dan dimanfaatkan. Pengakuan inovasi hampir merupakan cara individu menerima inovasi terkomputerisasi untuk dimanfaatkan. Penerimaan teknologi canggih diperlakukan sebagai hasil kerja asosiasi klien dalam pemilihan inovasi(Dinta Fernanda Maulidya, 2024).

Inovasi yang terkomputerisasi dirasa sangat penting, terlepas dari persepsi pengguna tentang minat untuk memanfaatkan kemajuan yang terbatas. Mengingat semakin meningkatnya minat terhadap kemajuan komputerisasi pada KTP Komputerisasi di Indonesia, inovasi-inovasi canggih akan menjadi sebuah penyelesaian dalam sistem informasi kita. Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk menyelidiki peran kaum milenial dan Gen-Z terhadap penerapan KTP Digital di Kota Lhokseumawe.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis survei langsung untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan KTP Digital di era Milenial. Penelitian dilakukan selama 3 bulan pada Januari-Maret 2024, dengan menggunakan kuisioner sebagai media pengumpul informasi. Sampel penelitian ini merupakan anak muda yang berdomisili di Kota Lhokseumawe dan masuk dalam Kategori Melinial Gen-Z sebanyak 170 orang. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Kesadaran, kemudahan penggunaan, kepercayaan, serta resiko dalam menggunakan KTP Digital. Analisa data dilakukan secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berhasil mendapatkan 170 responden yang sebagian besar responden adalah laki-laki. Responden Gen-Z dan Milenial pada umumnya memiliki gelar sarjana, padahal lulusan SMA juga memiliki angka yang sangat tinggi. Dari sisi teritorial, sebagian besar berasal dari kecamatan banda Sakti, disusul responden dari Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari penggunaan strategi comfort inspeksi.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah berupaya memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan berbagai cara demi menekan masalah dokumen kependudukan di kota Lhokseumawe, dimana salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelayanan yang melalui aplikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe. Peralihan ke format digital ini mencakup semua data terkait dokumen kependudukan, termasuk KTP. Kartu Tanda Penduduk digital merupakan suatu inovasi dari Ditjen Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui perangkat telepon pintar (Zulfa et al., 2024). Saat ini, pemerintah telah membuka layanan pendaftaran identitas kependudukan digital bagi masyarakat yang ingin menggunakan KTP berbasis android untuk berpindah ke KTP digital, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya memiliki telepon pintar berbasis android. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 72 Tahun 2022 menjelaskan bahwa IdentitasKependudukan

Digital (IKD) yang dilengkapi dengan QR Code akan menjadi identitas digital bagi setiap penduduk di Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah mencatat bahwa ribuan warga telah bermigrasi untuk beralih ke Kartu Tanda Penduduk digital. Sebanyak 2.590 jiwa telah mengantongi KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan sosialisasi penerapan KTP digital terus dilakukan untuk menjangkau seluruh masyarakat di Kota Lhokseumawe. Pelayanan pembuatan KTP digital melalui aplikasi IKD mulai diterapkan untuk masyarakat umum pada awal tahun 2023 (Faisal & Sahar, 2024). Inovasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Inovasi teknologi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih bermanfaat, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas.

Pada era sekarang ini, peran pemuda milenial juga menjadi booster dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Peran kaum millennial terutama Gen-Z sangat berpengaruh dalam niat adopsi layanan KTP Digital (Maulana et al., 2023). Selain itu, persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi digital dapat memotivasi pengguna untuk menggunakan teknologi digital. Demikian pula, kepercayaan yang dirasakan pada teknologi memiliki peran penting dalam niat untuk menggunakan teknologi digital. Tingkat kepercayaan millennial terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor generasi millennial dan Gen-Z memutuskan adopsi KTP Digital sebagai alat pengenalan identitas masa depan. Terdapat hal menarik yang muncul pada penelitian ini dimana persepsi risiko tidak berdampak pada niat untuk menggunakan KTP Digital. Kewajiban untuk bertransformasi dan pembebanan tanggung jawab serta risiko kepada pembuat kebijakan yakni pemerintah menjadi alasan ilmiah mengapa hal ini terjadi. Ini mengartikan bahwa, pemerintah harus mengupayakan infrastruktur sistem aplikasi KTP Digital yang tidak berpotensi menjadi saluran kejahatan cyber yang baru. Selain itu, generasi millennial dan Gen-Z tidak ingin mempermasalahkan risiko yang menimbulkan kurangnya kewaspadaan atas potensi kejahatan cyber akibat kelalaian.

Meskipun demikian, masih terdapat hambatan dalam hal sosialisasi yang dilakukan secara langsung karena belum semua masyarakat Kota Lhokseumawe mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi KTP digital. Hal ini terutama berlaku untuk kalangan yang lebih tua dan kurang memahami teknologi sehingga kesulitan dalam menggunakan KTP Digital. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai, tidak mencukupi, atau tidak kompeten dalam bidangnya. Selanjutnya, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentu apakah implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Setiap sektor dalam kebijakan sangat terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Sumber daya fasilitas juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementor memiliki pegawai yang memadai dan anggaran yang cukup, tanpa dukungan fasilitas fisik yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Sosialisasi program adalah langkah awal dalam pelaksanaan program. Tujuan sosialisasi adalah untuk memperkenalkan program kepada masyarakat,

memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat, atau tidak langsung, seperti melalui perantara seperti aparat desa, tokoh masyarakat, atau warga. Sosialisasi harus dilakukan dengan tepat dan benar karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program berikutnya (Rudi DS, 2012; (Astuti & Setiawan, 2024)) . Selain itu, faktor ketidakpahaman adanya teknologi dan informasi menjadi penghambat, sehingga masyarakat sulit untuk menjelaskan maupun menginformasikan kepada warga lainnya.

Simpulan

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi canggih sangat penting dalam mengawasi operasional organisasi dalam administrasi KTP Terkomputerisasi. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Digital di Kota Lhokseumawe, merupakan upaya inovatif untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi dokumen kependudukan. Implementasi kebijakan IKD atau KTP Digital, dengan menyoroti kelebihan, tantangan, dan kebaruannya. IKD menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan KTP fisik, antara lain kemudahan, keamanan, dan efisiensi. Namun, terdapat juga tantangan dalam penerapannya, seperti persepsi masyarakat terhadap keamanan data, kurangnya kesadaran dan pemahaman, serta terbatasnya kompatibilitas ponsel cerdas.

Peran kaum milenial juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi. Kaum millennial Gen-Z sangat berpengaruh dalam minat untuk mengadopsi layanan KTP Digital. Persepsi kemudahan terhadap penggunaan teknologi digital juga dapat memotivasi penggunaan teknologi digital. Begitu pula pada kepercayaan yang dirasakan, teknologi memiliki peran penting bagi pengguna terhadap pemerintah, sehingga menjadi salah satu faktor generasi millennial dan Gen-Z memutuskan adopsi KTP Digital sebagai alat pengenalan identitas masa depan.

Saran yang dapat di berikan dalam penelitian ini adalah dapat dilakukannya kolaborasi dengan pihak industri atau start-up yang berisi generasi millennial dan Gen-Z untuk persiapan perubahan KTP Komputerisasi. Melanjutkan kehati-hatian terkait faktor penilaian bahaya yang ditolak, akan lebih baik karena penanganan perubahannya memerlukan sosialisasi penggunaan KTP Lanjutan dan langkah-langkah untuk menghindari kejahatan siber. Sosialisasi KTP digital dapat dilakukan melalui media sosial dan arisan terpusat yang bekerja sama dengan sektor pendidikan atau industri. Di sisi pembiayaan, upaya harus dilakukan untuk mengecilkan upaya masyarakat atau biaya dalam transformasi dengan mengambil bola, menjangkau untuk mengajar baik di segmen instruktif dan mekanis serta layanan helpdesk menggunakan media Zoom atau Whatsapp. Keunggulan video call yang saat ini ada di segmen penyimpan uang dapat ditiru dengan framework aplikasi KTP Tingkat Lanjut. Pemikiran ini merekomendasikan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi kejahatan siber pada Aplikasi KTP Lanjutan, baik secara langsung maupun tersirat, serta upaya untuk meringankan potensi kerugian tersebut.

Mencermati potensi pelanggaran dunia maya dan upaya penghindarannya merupakan saran akademis di masa depan untuk semakin memantapkan keinginan masyarakat untuk berpindah agama dengan KTP yang Terkomputerisasi.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Astuti, W., & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(1), 47–60.
- Aulya Essy Ritonga, Kariaman Sinaga, S. S. (2023). Universitas Dharmawangsa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Jurnal Publik Reform*, 10(1), 35–49.
- Dinta Fernanda Maulidya, A. W. (2024). *VISA : Journal of Visions and Ideas* VISA : Journal of Visions and Ideas. 4(1), 282–291.
- Faisal, B., & Sahar, N. (2024). Digitalisasi Layanan Surat Keterangan Pada Desa Liu Kabupaten Wajo. *ADMIT: Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 64–84. <https://doi.org/10.33509/admit.v2i1.2718>
- Faris, A., Harahap, R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 769–776.
- Loris, Muhlis Hafel, & Darmanto. (2024). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(7), 5666–5679. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3288>
- Mahmood, M. (2016). Enhancing Citizens' Trust and Confidence in Government through Digital Transformation. *International Journal of Electronic Government Research*, 12(1). <https://doi.org/10.4018/IJEGR.2016010105>
- Maulana, S. A., Ferdiansyah, A., Umar, A. H., Negara, A. Y., Fadila, F., & Paksi, A. K. (2023). *Digitalisasi Kependudukan Berbasis Website Di Padukuhan Panggungan*. 2021.
- Widianis, K., & Sukraaliawan, I. N. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Digital Dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan : Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Oleh. *LOCUS: Majalah Ilmiah FIA Unipas*, 16(1), 1–17.
- Zulfa, I., Septima, R., Gemasih, H., & Informatika, F. T. (2024). *Analisis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)*. 5(3), 1165–1173.